DAFTAR PUSTAKA

- Demak, I., Manossoh, H., & Afandi, D. (2018). Analisis Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.
- Fachrani, R. (2021). Tinjauan atas Penghapusan Barang Milik Negara pada KPP Madya Pekanbaru.
- Menteri Keuangan RI. (2007). Peraturan Menteri Keuangan No. 96 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan.
- Menteri Keuangan RI. (2014). Surat Edaran No. SE-36/MK.1/2014 Tentang Pedoman Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- Menteri Keuangan RI. (2016a). Peraturan Menteri Keuangan No. 83 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Menteri Keuangan RI. (2016b). Peraturan Menteri Keuangan No. 111 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan PemindahtangananBarang Milik Negara. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Menteri Keuangan RI. (2018). Keputusan Menteri Keuangan No. 488 Tahun 2018 2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 520/KMK.01/2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan.
- Menteri Keuangan RI. (2021a). Peraturan Menteri Keuangan No. 118 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Menteri Keuangan RI. (2021b). Peraturan Menteri Keuangan No.165 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 111 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
- Presiden RI. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Presiden RI. (2004). UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.